

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkan Cita-cita bangsa dan tujuan negara itu di perlukan suatu organisasi pemerintahan yang akan melaksanakan tugas dan fungsi baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (*publik service*) yang di selenggarakan di tingkat pusat maupun daerah. Secara prinsipil kewenangan yang diberikan kepada suatu organisasi pemerintahan di maksudkan untuk memaksimalkan fungsi-fungsi utama pemerintahan yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Menurut Rasyid Tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga (3) fungsi yang dikehendaki yaitu :<sup>1</sup>

1. Pelayanan (*Service*) yang membutuhkan keadaan dalam masyarakat
2. Pemberdayaan (*Empowerment*) yang mendorong kemandirian masyarakat
3. Pembangunan (*Development*) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu Negara kesatuan yang mengakui azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan

---

<sup>1</sup> Rasyid, Ryass. 1997. *Dinamika Pemerintahan*. Penerbit Yarsif Waterphone Jakarta hal 48

keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggaraan otonomi daerah. Pasal 18 UUD 1945 antara lain mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-asul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintah Indonesia melalui undang-undang No. 32 tahun 2004 merupakan langkah penting dan relevan mengingat pemerintah daerah menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Arti penting pemerintahan daerah ini dapat dilihat dari alasan-alasannya pemerintah daerah, sebagai konsekwensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di satu negara. Otonomi telah menjadi kata kunci di dalam proses pergeseran orientansi pembangunan sekaligus orientansi hubungan kekuasaan antar daerah dan pusat.

Otonomi merupakan suatu pernyataan derajat “Kebebasan” suatu daerah terhadap pusat pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara lebih efektif lagi pembangunan itu sendiri, tetapi juga bagaimana pengelolaan ini dapat merupakan suatu bentuk sistem yang dapat menjadi basis bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam rangka untuk pengembangan sumber daya manusia untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, kompetensi dan profesional, terutama dalam menyongsong zaman era globalisasi maka kebutuhan pelatihan tenaga kerja akan terus meningkat karena pertumbuhan angkatan kerja maupun keperluan untuk menyesuaikan keterampilan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berubah begitu cepat. Untuk menghadapi pasar bebas, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penentu daya saing di dunia usaha, semakin tinggi kualitas tenaga kerja maka semakin besar pula kontribusi dalam meningkatkan daya saing di dunia usaha, tenaga kerja juga merupakan sebagai sarana produksi, selain itu juga tenaga kerja merupakan sarana produksi yang lain, karena tenaga kerja adalah manusia yang mengerakannya untuk menghasilkan suatu kualitas untuk menghasilkan barang.

Dengan mengingat bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja keseluruhan hampir konstan, hal ini terutama mencerminkan besarnya jumlah penduduk yang akan memasuki pasar kerja kendatipun demikian tingkat pertumbuhan penduduk merupakan tantangan yang lebih besar, dan perlu di catat bahwa tingkat kebutuhan pasar kerja sangat tinggi menurut standar dunia misalnya pertumbuhan penduduk dunia di perkiraan akan mengalami pertumbuhan yang semakin tahun meningkat sangat pesat sekali.

Dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya telah dikemukakan dalam berbagai tulisan baik sarjana-sarjana Indonesia maupun sarjana asing dalam penyerapan tenaga kerja, yang mengelompokan aktivitas ekonomi ke tiga sektor utama yaitu :<sup>2</sup>

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Pertambangan, Industri, Bangunan Listrik, Air, Gas,
3. Sektor Perdagangan, Transformasi, Keuangan, dan Jasa.

---

<sup>2</sup> Setyoko, Besar. 2006. *Standar Minimum BLK*. Penerbit Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta hal 9

Dengan mengangap bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja keseluruhan akan relatif konstan selama dasawarsa mendatang, kita bisa menduga tingkat penduduk tetap tinggi, tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang akan memasuki pasar kerja. Perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang cepat akan diikuti oleh perkembangan jumlah tenaga kerja yang pesat pula. Jumlah tenaga kerja muda akan memasuki pasar kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan ini akan berlangsung secara terus menerus.

Seperti halnya di Provinsi Riau yang memiliki jumlah tenaga kerja yang terus bertambah dari tahun ke tahun yang memasuki pasar kerja tentunya, baik dari masyarakat setempat maupun pendatang dari daerah lain, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya lulusan dari dunia pendidikan yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, disamping itu didukung oleh beragamnya kemampuan masyarakat dalam melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan tingkat pencari kerja yang berbeda pula tentunya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I. 1 : Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Riau Di Pekanbaru Belum Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2009/2011

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	37,619	17,990	55,609
2	SMP	28,058	11,885	39,943
3	SMA/MA/Sederajat	32,772	19,402	52,174
4	SMU kejuruan	10,334	4,680	15,014
5	DIPLOMA I & II	1,610	989	2,599
6	DIPLOMA III/Sarjana Muda	2,719	1,292	4,013
7	DIPLOMA IV/PT	3,290	3,729	7,019
Jumlah		148,507	95,924	244,431

Sumber : UPTLK Provinsi Riau Di Pekanbaru, 2011

Dari keterangan di atas dapat di lihat bahwa jumlah tenaga kerja yang di lihat pendidikan, jenis kelamin begitu banyak dan ini merupakan hal yang penting untuk di perhatikan oleh pemerintah dan di harapkan kepada pemerintah untuk mencari solusi untuk di lakukan pemecahan penanggulangan untuk mengatasi dampak pengangguran agar tidak bertambah meresahkan berdasarkan keterangan diatas, perlu adanya usaha pemerintah lebih serius lagi dalam peningkatan keterampilan dan keahlian kerja pada tenaga kerja untuk dapat menjadi tenaga kerja yang benar-benar memiliki keterampilan dan keahlian yang siap pakai agar dapat mengurangi dampak pengangguran yang semakin banyak dari tahun ketahun dan ini penting sekali untuk di perhatikan oleh pemerintah. Untuk membuat suatu kebijakan untuk mengatasi dampak pertumbuhan penduduk yang akan memasuki pasar tenaga kerja.

Dan salah satu usaha yang di lakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini membuat kebijakan untuk mengatasi dampak pengangguran tenaga kerja yang makin bertambah dari tahun ketahun maka Pemerintah Provinsi Riau membentuk semacam balai pelatihan yang di peruntukan untuk tenaga kerja yang belum bekerja atau pun bagi pengangguran, pemerintah dalam hal ini, bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau, untuk menjalankan kebijakan tersebut untuk mendidik tenaga kerja yang ingin mendapatkan pelatihan kerja dan balai tersebut di beri nama Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja yang disingkat dengan nama UPTLK yang diperuntukan untuk tenaga kerja agar bisa mendapatkan skil usaha, modal usaha untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian tenaga kerja.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Uraian tugas dan fungsi Unit pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Bab II Pasal 3. Untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerjasama pelatihan
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan informasi bidang pelatihan
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga pelatihan
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja
6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendayagunaan fasilitas pelatihan
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan masyarakat
9. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala dinas

Seiring dengan telah dibentuknya balai pelatihan tenaga kerja yang di harapkan bisa menyelenggarakan pelatihan dan menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan dan bekerja sesuai dengan bidang keahlian yang diinginkan oleh tenaga kerja serta mengatasi dampak pengangguran yang

semakin tahun bertambah jumlahnya maka diharapkan dengan diadakannya semacam balai pelatihan tenaga kerja ini sedikitnya kurangnya dapat mengatasi dampak pengangguran di Provinsi Riau yang semakin tahun semakin bertambah jumlahnya. Untuk melihat jumlah tenaga kerja yang di latih di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel I. 2 : Jumlah Tenaga Kerja Yang Di Latih Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau Di Pekanbaru Tahun 2009

NO	JURUSAN	L	P	J	TL	LLS	B	P (%)
1	TATA NIAGA	5	43	48	2	45	40	42,6
2	OTOMOTIVE	48	-	48	8	40	8	8,5
3	ANEKA KEJURUAN	1	47	48	6	42	10	10,6
4	TEKNOLOGI MEKANIK	48	-	48	-	48	9	9,6
5	LISTRİK	45	-	48	-	45	12	12,8
6	ELEKTRONİK	40	-	48	-	40	7	7,4
7	BANGUNAN	38	10	48	12	36	8	8,5
JUMLAH		225	100	325	33	247	94	100

Sumber : UPTLK Provinsi Riau Di Pekanbaru 2011

Keterangan :

- L : Laki-laki
- P : Perempuan
- J : Jumlah
- TL : Tidak lulus
- LLS : Lulus
- B : Bekerja
- P : Persentase (%)

Dari tabel I.2 di atas dapat di lihat bahwa jumlah tenaga kerja bahwa pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang di latih pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru sebanyak 325 dengan jumlah laki-laki 225 dan 100 perempuan hanya 94 orang yang bekerja dan sisanya menganggur.

Tabel I. 3 : Jumlah Tenaga Kerja Yang Di Latih Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau Di Pekanbaru Tahun 2010

NO	JURUSAN	L	P	J	TL	LLS	B	P (%)
1	TATA NIAGA	2	46	48	1	47	25	43,9
2	OTOMOTIVE	48	-	48	10	38	4	7
3	ANEKA KEJURUAN	2	46	48	4	46	7	12,3
4	TEKNOLOGI MEKANIK	44	-	44	-	44	6	10,5
5	LISTRİK	48	-	48	-	45	4	7
6	ELEKTRONİK	46	-	46	6	40	5	8,8
7	BANGUNAN	40	8	48	2	48	6	10,5
JUMLAH		230	102	330	23	308	57	100

Sumber : UPTLK Provinsi Riau Di Pekanbaru 2011

Keterangan :

- L : Laki-laki  
P : Perempuan  
J : Jumlah  
TL : Tidak lulus  
LLS : Lulus  
B : Bekerja  
P : Persentase (%)

Dari tabel I.3 di atas dapat di lihat bahwa jumlah tenaga kerja bahwa pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang di latih pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru sebanyak 330 dengan jumlah laki-laki 230 dan 102 perempuan hanya 57 orang yang bekerja dan sisanya menganggur.

Tabel I. 4 : Jumlah Tenaga Kerja Yang Di Latih Pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau Di Pekanbaru Tahun 2011

NO	JURUSAN	L	P	J	TL	LLS	B	P (%)
1	TATA NIAGA	5	43	48	-	48	12	54,6
2	OTOMOTIVE	48	-	48	-	48	2	9,1
3	ANEKA KEJURUAN	1	47	48	-	48	4	18,2
4	TEKNOLOGI MEKANIK	48	-	48	2	46	2	9,1
5	LISTRİK	40	-	40	4	36	1	4,5
6	ELEKTRONİK	28	-	28	2	26	1	4,5
7	BANGUNAN	38	10	48	5	43	-	-
JUMLAH		208	100	308	13	295	22	100

Sumber : UPTLK Provinsi Riau Di Pekanbaru 2011

Keterangan :

L : Laki-laki  
P : Perempuan  
J : Jumlah  
TL : Tidak lulus  
LLS : Lulus  
B : Bekerja  
P : Persentase (%)

Dari tabel 1.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja bahwa pada tahun 2011 jumlah tenaga kerja yang dilatih pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru sebanyak 308 dengan jumlah laki-laki 208 dan 100 perempuan hanya 22 orang yang bekerja dan sisanya menganggur.

Dari keterangan ke tiga tabel di atas dapat diketahui bahwa fenomena-fenomena masalah pelatihan tenaga kerja di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru belum berjalan secara optimal dan peneliti dapat menyimpulkan fenomena-fenomena masalah pelatihan tenaga kerja diantaranya :

1. Latar belakang peserta pelatihan tenaga kerja yang berbeda-beda seperti pendidikan dasar, pengalaman kerja, dan usia.
2. Dalam rekrutmen peserta pelatihan tenaga kerja bersamaan dengan pendidikan formal, sehingga mengalami kesulitan dalam perekrutan peserta pelatihan tenaga kerja karena pada umumnya alumnus sekolah mempunyai cita-cita untuk melanjutkan ke sekolah formal yang lebih tinggi.
3. Pengarahan Penjurusan. Melihat dari input peserta pelatihan yang berbeda-beda latar belakang pendidikan yang dimiliki sehingga Unit Pelaksana

Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru harus melakukan pengarahan terhadap calon peserta dalam menentukan jurusan yang akan dipilihnya sehingga dengan pertimbangan tertentu peserta pelatihan tenaga kerja dapat mengikuti diklat dengan baik, akan tetapi yang lebih di prioritaskan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru ini adalah minat peserta terhadap jurusan yang diambil.

4. Pelatihan kerja dilaksanakan tidak memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha
5. Tidak ada hubungan kerjasama terhadap dunia usaha atau instansi terkait

Berdasarkan fenomena dan permasalahan di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPTLK) PROVINSI RIAU DI PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN PELATIHAN TENAGA KERJA”.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas tentang pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, maka penulis merumuskan masalah pokok tersebut adalah dengan judul melihat yaitu : “ **Bagaimanakah Peranan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau Di Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.**”

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan tertentu berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peranan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru dalam Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.
- c. Untuk mengetahui upaya Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru dalam mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Kerja.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam rangka menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu diharapkan mempunyai manfaat secara akademis dan teoritis untuk mengembangkan ilmu khususnya Ilmu Pemerintahan dan juga Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru dan lebih lanjut manfaat praktis dalam rangka memecahkan masalah yang aktual. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Secara Akademis

Sebagai bahan informasi dan data skunder bagi para penelitian yang akan datang untuk melakukan penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru. Yang berkaitan dengan tenaga kerja.

b. Secara Teori

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan dan dapat memperkaya infentaris hasil-hasil penelitian di Ilmu Pemerintahan.

c. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pelatihan tenaga kerja di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Provinsi Riau di Pekanbaru.